

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2022



DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2022

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas Bimbingan dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini disusun dengan harapan semoga dapat memberikan gambaran keadaan dan informasi rencana kerja untuk Tahun 2022 pada SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini berkat kerja sama yang baik dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka pembangunan sektor Pertanian khususnya dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya.

Pangkajene Sidenreng, 22 Juli 2022

Kepala Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan
Ketahanan Pangan
Kab. Sidenreng Rappang



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	4
I.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	6
II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	6
II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	20
BAB III. RENCANA KERJAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	27
BAB IV. PENUTUP	35

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2022 (tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang.....	11
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	28

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang bersumber dari Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD, dengan mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan perumusan program, kegiatan indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD.

Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi RKPD harus berdasarkan hasil verifikasi renja SKPD. Sehingga antara renja SKPD dengan dokumen RKPD mempunyai keterkaitan yang sama-sama disusun berdasarkan program prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program/kegiatan yang searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Visi "*Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera*" yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang masuk dalam misi 2 (dua) yaitu: "*Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*". Dengan memperhatikan visi dan misi, maka dapat dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas RPJMD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang yang sasaran pelaksanaan senantiasa diletakkan pada pengarahannya potensi sumber daya alam dan strategi pembangunan daerah yang dikembangkan dan disinergikan dengan sumber daya manusia. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar semua komponen dalam pembangunan pertanian terakumulasi dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pelaksanaan Perubahan RENJA OPD dalam satu tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

I.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi selatan No. 2 Tahun 2010);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 (Lembaran Daerah No. 26 Tahun 2007);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 sampai dengan 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor 36);

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Memberikan gambaran terhadap Rencana Kerja Tahun 2022 yang akan dibahas dalam rumusan rencana Kegiatan berdasarkan Program Prioritas.
- b. Pembahasan Kerangka Regulasi pembiayaan ke dalam kegiatan prioritas.
- c. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

2. Tujuan

- a. Terciptanya sinergisitas antara bidang dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Terakumulasinya usulan hasil musrembang dalam kerangka aspiratif masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.
- d. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan urusan pertanian dan pangan berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Tahun 2018 sampai dengan 2023.

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

- e. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
- a. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;
- Bab II: Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan PD berisi tentang Urusan/bidang urusan/program/kegiatan beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.
- Bab V: Penutup yang berisikan catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Adapun total anggaran belanja Tahun 2022 sebesar Rp 29.011.844.000,- yang bersumber dari APBD DAU dan DAK yang terdiri dari 9 program, 17 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan realisasi sampai pada triwulan II yaitu realisasi keuangan Rp 5.215.366.269,- (16,93%) dan realisasi fisik 18,17%. Hal ini disebabkan adanya usulan Musrenbang dan Pokok Pikiran Anggota DPRD dan kegiatan belum terealisasi 100% sampai pada triwulan II tahun 2022 dikarenakan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan ini menyajikan hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 terdiri :

1. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 50,00%.
 - 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 64,47%.
 - 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

- 100% yang belum teralisasi disebabkan kegiatan tersebut tidak dianggarkan pada tahun 2021 dan 2022.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 50,00%.
 - 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 23,33% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
 - 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 40,00%.
 - 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 19,28% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
 - 8) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 50,00%.
 - 9) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan target 100% yang terealisasi 38,10%.
 - 10) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan target 100% yang terealisasi 96,76%.
 - 11) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan target 100% yang terealisasi 33,33%.

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

- 12) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 100% belum terealisasi disebabkan kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tahun 2022.
- 13) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 33,33%.
- 14) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 50,00%.
- 15) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 9,71%.
- 16) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana dengan target 100% yang terealisasi 35,71%.
- 17) Program Perizinan Usaha Pertanian dengan kegiatan Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 33,33%.
- 18) Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 4,56%.

Berdasarkan rincian kegiatan diatas yang belum melebihi target kinerja secara umum dikarenakan sisa target yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu pada triwulan IV tahun 2022 dan 2023.

Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan belum mencapai target atau melebihi target kinerja dan akan dilaksanakan sisa target kinerja pada tahun selanjutnya.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:
 - a. Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sehingga sedikit menghambat pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan perangkat daerah.
 - b. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c. Kurangnya sumber daya manusia untuk menunjang pencapaian kinerja pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidereng Rappang.

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

- d. Kurang maksimalnya kegiatan pembinaan akibat pembatasan gerak dan keterbatasan dana operasional.
 - e. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.
 - f. Adanya perubahan anggaran untuk dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
3. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD
- Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2021 yaitu :
- a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
 - b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
 - c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.
4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu alokasi dana yang tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan agar target tercapai.
- a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
 - b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
 - c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
 - d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.
 - e. Untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian terutama yang sumber dananya dari APBN perlu disiapkan dana pendamping untuk desain, pengawasan dan operasional dalam rangka mendukung program prioritas kabinet kerja bidang pertanian.

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja perubahan Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) pada tabel II.1.

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Tabel II. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Lembar : 1 dari 9 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10=(6+8)	11=(10/5*100)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.09	Pangan									
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100 32.356.739.000	100,00 9.930.419.453	100 10.430.165.000	29,32 4.658.311.169	29,32	447,00	82,78
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100 180.000.000	100,00 23.890.000	100,00 44.350.000	13,64 14.820.400	13,64	11,00	50,00
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16 115.000.000	6 13.390.000	5 34.350.000	2 10.639.400	40,00	8,00	50,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6 65.000.000	2 10.500.000	2 10.000.000	1 4.181.000	50,00	3,00	50,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100 28.498.517.000	100,00 9.100.753.987	100,00 9.695.153.000	31,52 4.335.001.414	31,52	225,00	64,47

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	313 28.370.517.000	103 9.050.730.787	104 9.651.653.000	104 4.309.553.486	100,00	207,00	66,13
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36 128.000.000	12 50.023.200	12 43.500.000	6 25.447.928	50,00	18,00	50,00
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100 72.000.000	- -	- -	- -	-	-	-
2.09.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3 72.000.000	- -	- -	- -	-	-	-
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100 624.174.000	100 246.030.107	100,00 152.126.000	16,67 96.777.000	16,67	3,00	50,00
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3 6.412.000	1 1.960.000	1 2.058.000	1 2.058.000	100,00	2	66,67
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3 617.762.000	1 244.070.107	1 150.068.000	- 94.719.000	-	1	33,33
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100 303.754.000	100,00 -	100 28.250.000	- -	-	100,00	100,00
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1 87.654.000	- -	- -	- -	-	-	-
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	29 216.100.000	7 -	2 28.250.000	- -	-	7	24,14

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 2.483.380.000	100,00 408.888.660	100,00	418.367.000	6,67	187.345.648	6,67	33	40,00	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3 11.510.000	1 4.400.000	1	1.987.200	-	966.000	-	1	33,33	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36 356.826.000	12 56.567.660	12	70.020.000	3	20.311.848	25,00	15	41,67	
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3 48.060.000	1 915.000	1	7.685.000	-	3.675.000	-	1	33,33	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3 2.066.984.000	1 347.006.000	1	338.674.800	-	162.392.800	-	1	33,33	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	%	100 266.914.000	100 150.856.699	100,00	91.919.000	2,06	24.366.707	2,06	75	19,28	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	148 210.420.000	50 133.056.699	38	75.054.000	7	14.366.707	18,42	57	38,51	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	158 22.747.000	5 10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	6	3,80	

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2022					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	83	33.747.000	12	7.800.000	15	6.865.000	-	-	-	12	14,46
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	%	7,50	2.000.000.000	-	483.433.600	7,00	2.000.000.000	-	-	-	-	-
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	%	100	2.000.000.000	50,00	483.433.600	66,67	2.000.000.000	-	-	-	50,00	50,00
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	2	2.000.000.000	1	483.433.600	2	2.000.000.000	-	-	-	1,00	50,00
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	%	94,00	4.305.651.200	90,28	955.407.000	93,00	1.110.000.000	-	114.627.500	-	90,28	96,04
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan	%	100	1.076.302.000	30,95	15.507.400	66,67	30.000.000	7,14	4.459.000	10,71	16	38,10
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	3	40.808.000	1	8.593.800	1	22.000.000	-	3.000.000	-	1	33,33
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	36	25.869.000	12	6.913.600	12	8.000.000	3	1.459.000	25,00	15	41,67

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	3	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan		92,50	3.993.143.200	89,50	939.899.600	91,50	1.080.000.000	-	110.168.500	-	89,50	96,76
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	3	89.007.200	1	17.835.000	1	40.000.000	-	4.220.000	-	1	33,33
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	3	3.904.136.000	1	922.064.600	1	1.040.000.000	-	105.948.500	-	1	33,33
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	100	94.146.000	-	6.125.000	64,71	57.500.000	-	4.678.000	-	-	-
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta FSVA yang Tersusun	%	100	162.911.000	33,33	6.125.000	66,67	37.500.000	-	1.225.000	-	33,33	33,33
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	3	162.911.000	1	6.125.000	1	37.500.000	-	2.985.000	-	1,00	33,33
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani	%	100	65.000.000	-	-	64,71	20.000.000	-	3.453.000	-	-	-

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	3 65.000.000	- -	1 20.000.000	- 3.453.000	-	-	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.27	Pertanian									
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	%	100 16.348.263.000	63,17 3.357.947.562	90,12 5.450.500.000	63,17 11.753.000	70,09	63,17	63,17
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%	100 16.348.263.000	25,10 3.357.947.562	100,00 5.450.500.000	- 11.753.000	-	3,00	33,33
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	6 14.262.514.000	2 3.315.942.562	2 5.204.000.000	- -	-	2	33,33
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	3 2.085.749.000	1 42.005.000	1 246.500.000	- 11.753.000	-	1	33,33
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	100 89.400.793.625	9,26 7.429.035.300	63,04 5.618.573.000	- 76.805.300	-	9,26	9,26
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100 94.975.000	33,33 12.026.000	100,00 19.500.000	16,67 8.013.000	16,67	18,00	50,00
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	36 94.975.000	12 12.026.000	12 19.500.000	6 8.013.000	50,00	18,00	50,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	%	100 24.534.411.000	23,11 7.417.009.300	100,00 5.599.073.000	- 68.792.300	-	23,11	9,71
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	17 2.300.000.000	1 618.543.000	4 451.080.000	- -	-	1	5,88
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	141 8.035.800.000	21 1.983.620.800	3 145.000.000	- 2.565.300	-	21	14,89
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	56 9.010.000.000	20 3.044.110.500	24 3.070.000.000	- 2.698.500	-	20	35,71
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7 750.000.000	5 589.549.000	- -	- -	-	5	71,43
3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7 701.200.000	5 584.330.000	- -	- -	-	5	71,43
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7 1.805.000.000	2 254.818.000	3 1.691.547.000	- 3.109.000	-	2	28,57
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3 1.932.411.000	1 342.038.000	1 241.446.000	- 60.419.500	-	1	33,33

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	100 4.211.764.000	35,71 258.968.200	82,78	298.150.000	53,64	2.160.000	64,80	53,64	53,64	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100 4.211.764.000	35,71 258.968.200	100,00	298.150.000	53,64	2.160.000	53,64	750,00	35,71	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	2.100 1.158.340.000	750 258.968.200	700	298.150.000	-	2.160.000	-	750	35,71	
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	100 33.150.000	33,33 10.929.000	74,47	10.000.000	-	5.858.000	-	33,33	33,33	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	100 33.150.000	33,33 10.929.000	100,00	10.000.000	-	5.858.000	-	1	33,33	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	3 33.150.000	1 10.929.000	1	10.000.000	-	5.858.000	-	1	33,33	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP		1:15 15.109.317.700	1:20 4.109.042.650	1:17	5.804.559.000	-	286.239.400	-	1:20	4,56	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	%	100 15.109.317.700	25,50 4.109.042.650	100,00	5.804.559.000	-	286.239.400	-	2.018,00	33,31	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	33 511.702.000	11 34.834.000	11	60.000.000	-	40.967.000	-	11	33,33	

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	5.991 5.135.597.700	1.993 1.177.044.000	1.999 1.753.790.000	- 202.476.000	-	1.993	33,27
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	29,00 8.963.465.000	12 2.838.456.900	14 3.920.000.000	- 30.066.000	-	12,00	41,38
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	3 36.790.000	1 4.525.750	1 10.000.000	- 1.451.000	-	1	33,33
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	3 461.763.000	1 54.182.000	1 60.769.000	- 11.279.400	-	1	33,33

II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategi adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal yang tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam struktur organisasi perangkat daerah baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan subsektor yang ditangani, yaitu Bidang Tanaman Pangan yang menangani sub sektor tanaman pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan yang menangani sub sektor Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang menangani sub sektor Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Ketahanan Pangan yang menangani sub sektor ketahanan pangan, Bidang Penyuluhan Pertanian yang menangani sub sektor penyuluhan Pertanian. Bentuk organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi lebih efektif.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek seperti: 1) perubahan iklim dan kerusakan lingkungan; 2) peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan; 3) ketersediaan infrastruktur, dan sarana produksi pertanian; 4) kelembagaan petani dan penyuluh; 5) kepemilikan dan alih fungsi lahan; 6) akses petani

terhadap permodalan; 7) perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus; 8) ketahanan pangan masyarakat. isu-isu startegis tersebut dapat diurai sebagai berikut:

1. *Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan*

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celcius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun.

Di sektor pertanian dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosif hama penyakit serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun ditingkat lapangan kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi dan adaptasi yang diperlukan.

2. *Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan*

Kondisi produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Selanjutnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, maka dikembangkan pula hilirisasi

komoditas pertanian strategis. Hilirisasi mencakup kegiatan pertanian secara terpadu mulai dari pengolahan sampai penanganan dan pemasaran hasil pertanian.

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

3. Ketersediaan Infrastruktur, dan Sarana Produksi Pertanian

a. Jaringan Irigasi

Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi petani sangat menurun. Kerusakan terutama diakibatkan banjir dan erosi serta desakan pemukiman dan campur tangan manusia menyebabkan kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan yang sudah ada, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

b. Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian/Jalan Produksi

Jalan usaha tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan

c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan

greenhouse untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi kedepan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup dan berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.

- d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas disentra produksi.

Pupuk merupakan sarana produksi yang seringkali menjadi langkah pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi, dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih unggul dan bermutu, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

4. Kepemilikan dan Alih Fungsi Lahan

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut disebabkan antara lain, meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat

dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani sehingga kegiatan ushatani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahatani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, regulasi atau peraturan, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

5. Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang di pedesaan.

6. Keterbatasan Akses Petani terhadap Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan

investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan.

7. *Perbaiki Citra Petani dan Pertanian Agar Kembali Diminati Generasi Penerus*

Belum berkembangnya agroindustri di perdesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek produksi *on-farm* dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Kondisi ini pada akhirnya kurang menarik minat generasi muda di perdesaan untuk bekerja dan berusaha di bidang pertanian, terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan sekolah menengah ke atas. Oleh karena itu ke depannya perlu upaya pematapan pengembangan agroindustri di perdesaan. Selain itu, perlu juga mendorong pengembangan mekanisasi pertanian (alsintan tepat guna) agar bidang pertanian lebih menarik generasi muda selain untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas pertanian.

8. *Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis pada Pangan Lokal*

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan. Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami banyak perkembangan. Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah : (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan (seperti APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK dan lain-lain) yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Perumusan perubahan rencana kerja program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2022 tersebut telah mempertimbangan beberapa faktor, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran daerah dan sasaran perangkat daerah, visi dan misi kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2024 dan tema pembangunan pada tahun 2022 dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2024.

Pada tahun 2022 jumlah anggaran dana/pagu indikatif pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang bersumber dari DAU. Kabupaten Sidenreng Rappang setelah mengalami pergeseran APBD sebesar Rp 28.486.844.000,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 29.011.844.000,-. Adapun rincian perubahan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2021 dapat dilihat Tabel III.1.

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Lembar : 1 dari 7 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2022							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.09	Pangan			13.617.582.000				13.617.582.000		
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			10.450.082.000				10.450.082.000	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	44.350.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan		100%	44.350.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	5 Dokumen	34.350.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	5 Dokumen	34.350.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	10.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	10.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	9.695.153.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan		100%	9.695.153.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	104 Orang/Bulan	9.651.653.000	ASN Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	104 Orang/Bulan	9.651.653.000	ASN Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2022							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	43.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	43.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100%	172.043.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan		100%	172.043.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Paket	2.058.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Paket	2.058.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	169.985.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	169.985.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	28.250.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan		100%	28.250.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	28.250.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	28.250.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	418.367.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan		100%	418.367.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.987.200	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.987.200	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	70.020.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	70.020.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2022							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	7.685.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	7.685.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	338.674.800	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	338.674.800	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah		100%	91.919.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan		100%	91.919.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	38 Unit	75.054.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	38 Unit	75.054.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	15 Unit	6.865.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	15 Unit	6.865.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penguatan Cadangan Pangan		7,00	2.000.000.000				2.000.000.000	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan		100%	2.000.000.000			100%	2.000.000.000	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Kec. Pitu Riawa, Kec. Wt. Sidenreng	2 Unit	2.000.000.000	2 Gapoktan	Kec. Pitu Riawa, Kec. Wt. Sidenreng	2 Unit	2.000.000.000	2 Gapoktan

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2022							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita		92%	1.110.000.000			92%	1.110.000.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan		25,93%	30.000.000			25,93%	30.000.000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	22.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	22.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	8.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	8.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan	Kab. Sidenreng Rappang	90,5	1.080.000.000			90,5	1.080.000.000	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	40.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	40.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	1.040.000.000	46 Kelompok Wanita Tani	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	1.040.000.000	46 Kelompok Wanita Tani
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		33,33%	57.500.000			33,33%	57.500.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta FSVA yang Tersusun		66,67%	37.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan		66,67%	37.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	37.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	37.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2022							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani		64,71%	20.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan		64,71%	20.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	20.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	20.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				16.656.782.000				14.640.973.000	
3.27	Pertanian				16.656.782.000				14.640.973.000	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian			5.235.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan			2.925.210.000	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			5.235.500.000				2.925.210.000	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	4.989.000.000	1999 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	5.204.000.000	1999 Kelompok Tani
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	246.500.000	15 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	246.500.000	15 Kelompok Tani
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian		63,04%	5.558.573.000			63,04%	5.611.898.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian		20,00%	19.500.000			20,00%	12.825.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	19.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	12.825.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2022							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian		100%	5.539.073.000		100%	7,49%	5.599.073.000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	391.080.000	2 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	451.080.000	4 Kelompok Tani
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	3 Unit	145.000.000	3 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	3 Unit	145.000.000	3 Kelompok Tani
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	24 Unit	3.070.000.000	18 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	24 Unit	3.070.000.000	24 Kelompok Tani
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Wt. Sidenreng dan Dua Pitue	3 Unit	1.691.547.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Wt. Sidenreng dan Dua Pitue	3 Unit	1.691.547.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pitu Riase	1 Unit	241.446.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Pitu Riase	1 Unit	241.446.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)		82,78%	298.150.000			82,78%	289.306.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		14,52%	298.150.000			14,52%	289.306.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Sidenreng Rappang	700 Hektar	298.150.000	350 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	700 Hektar	298.150.000	350 Kelompok Tani

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2022							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian		21,28%	10.000.000			21,28%	10.000.000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Pertanian		21,28%	10.000.000			21,28%	10.000.000	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	10.000.000	55 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	10.000.000	55 Kelompok Tani
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP		1:19	5.554.559.000			1:19	5.804.559.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian		26,80%	5.554.559.000			26,80%	5.804.559.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	60.000.000	Penyuluh ASN dan Penyuluh PPPK	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	60.000.000	Penyuluh ASN dan Penyuluh PPPK
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	1999 Unit	1.753.790.000	1999 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	1999 Unit	1.753.790.000	1999 Kelompok Tani
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	13 Unit	3.670.000.000	85 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	14 Unit	3.920.000.000	85 Kelompok Tani
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	97 Gapoktan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	97 Gapoktan
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pitu Riawa, dan Pitu Raise	1 Unit	60.769.000	45 Kelompok Tani	Pitu Riawa, dan Pitu Raise	1 Unit	60.769.000	45 Kelompok Tani

**BAB IV.
PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2022 yang disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2021 disusun mengacu kepada Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2021, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2022, dan memuat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2022, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk dijadikan pedoman Tahun Anggaran 2022 dan diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, dalam ikut serta mewujudkan tercapainya pembangunan yang lebih maju.

Pangkajene Sidenreng, 22 Juli 2022

Kepala Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan
Ketahanan Pangan
Kab. Sidenreng Rappang

